

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Ubaidillah**, et al, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000
- Abrar Saleng**, *Hukum Pertambangan*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta
- Afan Ghaffar**, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001
- Alfin Sulaiman**, *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2011.
- Ali Rido**, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1981
- Aminuddin**, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012
- Andrian Sutedi**, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Anonimous**, *Keuangan Negara dan Badan Pemeriksaan Keuangan*, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksaan Keuangan Negara, Jakarta, 2000
- Arifin P. Soeria Atmadja**, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Athur M. Schlesinger Jr. Dan Roger Burn (ed), *Congress Investigation: A Documented History, 1792-1974*; Andrew Beale, *Essential, Constitutional Law, Second Edition*, 1997

Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UII Press, Jakarta, 1995.

Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Badar Maju, Bandung

Budi Agus Riswandi, *Good Corporate Governance Di BUMN*, Total Media, Yogyakarta, 2008

Dian Puji Simatupang, *Determinasi Kebijakan Anggaran Negara*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2005

Deno Kamelus, *Fungsi Hukum Terhadap Ekonomi Indonesia*, Disertasi, PPSUNAIR, Surabaya, 1998

Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Yogyakarta: Total Media, 2013.

Erman Rajagukguk, *Perlunya Judicial Review UU Keuangan Negara dan Pembaharuan UU Anti Korupsi*, disampaikan pada ceramah di fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 18 Juni 2011 dalam “*Butir-butir Hukum Ekonomi*”, 65 tahun Erman Rajagukguk. (Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum UI, Jakarta 2011

Fahri Hamzah, *Negara BUMN dan Kesejahteraan Rakyat*, Yayasan Faham Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012

F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007.

Gatot Subroto, *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.

Hambra, Implikasi Keuangan BUMN sebagai Keuangan Negara, disampaikan pada seminar tentang BUMN di Bali, 8 Mei 2015

Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2009

Ikhwan, *Memahami Anggaran Publik*, MCW, YAPIIKA, Jakarta, 2005.

Ikhwan Fahrojih dan Mokh. Najih, *Menggugat Peran DPR dan BPK Dalam Reformasi Keuangan Negara*, In Trans Publishing, Malang, 2008.

I. Wibowo, *Negara dan Bandit Demokrasi*, (Jakarta: Kompas, 2010),

Jimly Assiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002

-----, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

-----, *Konstitusi Ekonomi*, PT. Mompas Media Nusatara, Jakarta, 2010

-----, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

-----, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Pres, Jakarta, 2006.

-----, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

-----, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi kedua), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan & Balai Pustaka, Jakarta, 1995

La Ode Husen, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR, DPD, BPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2005

Mishardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Kerangka Good Corporate Governance*, UI Pres, Jakarta, 2002

M. Rusli Karim, *Negara: Suatu Analisis Mengenai Pengertian Asal Usul dan Fungsi*, Tiara Wacana, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 1997

Merdiansa Paputungan, *Diskursus Kewenangan Audit BPK terhadap Keuangan BUMN (Perseroan) Pasaca Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013*, *Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 3, Fakultas Hukum UGM, 2017

Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*, Cetakan Ke 5: Rajawali Press, Jakarta, 2016

-----, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Press, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Munir Fuadi, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketiga, Bandung, 2014

Mustaqiem, *Hukum Keuangan Negara*, Buku Litera, Yogyakarta, 2017

Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2011.

- , *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945 (Pasca Perubahan)*, UII Press, Yogyakarta, 2007
- , *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003
- *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Refly Harun**, *Badan Usaha Milik Negara Dalam Sudut Pandang Tata Negara*, Balai Pustaka, Jakarta, 2019
- Revrison Baswier**, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, BPFE, Cetakan ke III, Yogyakarta, 2000
- Riawan Tjandra**, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, PT. Grasindo, 2014.
- Ridwan HR**, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002
- Ridwan Khairandy, Dolli Setiawan Ritonga, Hanafi Amrani**, *Korupsi Keuangan Negara di BUMN*, FH UII Press, Yogyakarta, 2018
- Robert A. Dahl**, *Demokrasi Ekonomi: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992
- Rudhi Prasetya**, *“Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Kedua, 1996
- Saifudin**, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Perundang-Undangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji**, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sri Edi Swarsono, *Kerakyatan Demokrasi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial*,
Seminar Implementasi Pasal 33 dan 34 UUD 1945, Gerakan Jalan Lurus,
Jakarta, 6 Agustus 2008.

Sri Rejeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Cetakan
Pertama, Malang, 2007

-----, *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis*, Persembahan kepada Sang
Maha Guru, Yogyakarta, Tanpa Penerbit, 2006.

Sujanto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan
Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011

Wuri Andriyani, *Kedudukan Persero dalam Hubungan dengan Hukum Publik
dan Badan Hukum Privat*, Disertasi, Nasakah Ujian Tahap II, PPS Unair,
2009

Jurnal

A.M. Tri Anggraini, “*Aspek Monopoli Atas Cabang Produksi Yang Mengusasi
Hajat Hidup Orang Banyak Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*”,
Jurnal Hukum Prioris, Volume 2 Nomor 4, Februari 2010, Fakultas
Hukum Universitas Trisakti Jakarta.

Erman Rajagukguk, “*Walaupun Keuangan BUMN Bukan Keuangan Negara,
KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian Tetap Berwenang Memeriksa Korupsi
di BUMN*”, makalah hlm. 1, diakses dari

<http://www.ermanhukum.com/dokumen/keuangan%20BUMN%20bukan%20Keuangan%20Negara.pdf>, pada 22 Desember 2019.

Helmi Kasim, “*Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Business Judgement Rules*”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2017

Hikmahanto Juwana, *Keuangan Negara, BUMN dan Korupsi*, *Buletin Kementrian BUMN, Suara Pemegang Saham*, Edisi 75 Tahun VII, 30 September 2013

Ibrahim R., *Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN: Sebuah Tinjauan*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26 No 1 Tahun 2007.

J. Ronald Mawuntu, “*Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Konstitusi*”, *Jurnal Hukum*, Volume XX Nomor 3 April-Juni Tahun 2012, Universitas Samratulangi

Muhammad Septiawan, “*Tinjauan Yuridis Maknadan Konspe Terhadap Substansi Hukum Hak Menguasai Negara dan Hak Milik Atas tanah (Studi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV dan Undang-Undang Nomr 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)*”, *Jurnal Beraja Niti*, Volume 2 Nomor 12, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2013

Nindyo Pramono, *Keuangan Negara, BUMN dan Korupsi*, Buletin Kementerian BUMN, *Suara Pemegang Saham*, Edisi 75 Tahun VII, 30 September 2013

Notonagoro, *Politik hukum dan Pembangunan Agraria*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 99 dalam J. Ronald Mawuntu, “*Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Konstitusi*”, *Jurnal Hukum*, Volume XX Nomor 3 April-Juni Tahun 2012, Universitas Samratulangi Januari 2010, Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta.

Ridwan Khairandy, “*Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara*”, *Jurnal Hukum UII*, No 1 Volume 16 Januari 2009

Ridwan Khairandy, *Konsepsi Kekayaan Negara yang dipisahkan dalam Perusahaan Perseroan*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26 No.1 Tahun 2007

Sofyan A. Djalil, BUMN: Lokomotif Ekonomi di Masa Krisis, Dalam majalah *Manajemen Usahawan Indonesia*, Nomor 6 Tahun XXVIII, Juni 1999

Sutan Remi Syahdeini, *Peranan Fungsi Pengawasan Bagi Pelaksanaan Good Corporate Governance*, “*Reformasi Hukum di Indonesia Sebuah Keniscayaan*”, Editor RM Talib Puspokusumo, tim pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2000

OECD, *OECD Principles of Corporate Governance*, France: OECD Publication Services, 2004

World Bank, Preface to the world Bank Publication Corporate Governance: A Framework for Implementation, “Makalah disampaikan pada acara Publication Corporate Governance: A Framework for Implementation, 20 September 1999, diakses di http://egeg/egemain/html_en/index, diakses tanggal 8 Januari 2020.

Web

Diakses di <http://www.neraca.co.id/article/109634/mk-tolak-permohonan-uji-materi-uu-bumn>, pada tanggal 21 Juni 2019, Pukul 21.18 wib.

Diakses di <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1979509/ini-dia-liku-liku-kisruh-pembelian-7-saham-newmont>, pada tanggal 22 Juni 2019, pukul 22.01 wib.

Diakses di <https://investor.id/archive/menkeu-hormat-putusan-mk-terkait-divestasi-newmont>, pada tanggal 24 Juni 2019, pukul 23.23 wib.

Diakses di <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14316>, pada tanggal 21 Juni 2019, Pukul 21.01 wib.

Diakses di <https://nasional.republika.co.id/berita/p3s4l7354/uu-bumn-digugat-ke-mahkamah-konstitusi>, pada tanggal 21 Juni 2019, Pukul 23.33 wib.

Diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5017b88235b48/mk-divestasi-newmont-harus-persetujuan-dpr/>, pada tanggal 23 Juni 2019, pukul 01.00 wib.

Diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5acb494f8a283/holding-bumn-tetap-dalam-kontrol-dpr/>, pada tanggal 20 Juni 2019, pukul 22.02 wib.

Diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b104b87baf27/alasan-mk-tolak-uji-aturan-holding-bumn/>, pada tanggal 21 Juni 2019, Pukul 23.03 wib

Diakses di <https://www.larasonline.com/berita/MK-Tolak-Permintaan-Pelibatan-DPR-Dalam-Aksi-Korporasi-Penggabungan-BUMN>, pada tanggal 21 Juni 2019, Pukul 22.00 wib.

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2004 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara

Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang Kekayaan BUMN

Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 tentang Kekayaan BUMN dan Pengawasan oleh BPK

Putusan MK Nomor 12/PUU-XVI/2018 tentang Pengawasan BUMN oleh DPR

Putusan MK Nomor 14/PUU-XVI/2018 tentang Tujuan BUMN, Pengawasan BUMN oleh DPR, dan Pembentukan *Holding* BUMN

Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara

Wawancara

Hasil wawancara dengan Riawan Tjandra pada tanggal 1 November 2019, pada Pukul
16.10 wib, yang berlokasi di Pascasarjana Hukum UII

